

Tanah Longsor Akibatkan 12 Rumah di Cibadak Rusak

SUKABUMI (IM)-Tanah longsor pada Rabu (24/1) pagi menyebabkan 12 rumah warga rusak di Kampung Cibatuhihir, Desa Sekarwangi, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat.

Kepala Desa Sekarwangi, Abeng Baenuri menyampaikan bahwa warga yang rumahnya terdampak tanah longsor akibat hujan deras yang turun sejak Rabu pagi terpaksa harus mengungsi.

"Tidak ada korban jiwa pada kejadian bencana tanah longsor di RT 01/11 Desa Sekarwangi ini," katanya.

Abeng menerima informasi mengenai kejadian perger-

akan tanah di Kampung Cibatuhihir sekitar pukul 06.30 WIB dan langsung menuju ke lokasi kejadian.

Setelah sampai di lokasi, dia mendapati beberapa rumpun bambu sudah miring. Dia lantas mengimbau warga yang rumahnya berada di sekitar tebing untuk mengungsi ke tempat yang aman.

Tak lama kemudian, tanah di area tebing itu longsor dan menimpa rumah warga. Semula ada 10 rumah yang terkena longsor tanah, tetapi jumlahnya kemudian bertambah menjadi 12 rumah. ● pra

Pemkot Bandung Rampungkan Sejumlah Infrastruktur di 2023

BANDUNG (IM)-Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung telah merampungkan sejumlah pekerjaan infrastruktur di sepanjang 2023. Diantaranya kolam retensi, dan trotoar bagi pejalan kaki.

Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Kota Bandung Didi Ruswandi mengatakan, total ada sebanyak 12 pembangunan kolam retensi bersama rumah pompa hadir di Kota Bandung.

"Total ada 12 kolam retensi yang telah kita bangun sampai dengan 2024, dan beberapa belum kita resmikan seperti kolam retensi Margahayu dan Rancabolang 3," kata Didi Ruswandi, Rabu (24/1).

Sementara pekerjaan trotoar, dituturkan ia bahwa pihaknya telah menyelesaikan beberapa perbaikan dan dan pelebaran di beberapa lokasi. Pasirkaliki, Gatot Subroto, dan Cihampelas di antaranya.

Didi menjelaskan, untuk pedestrian di kawasan Jalan Pasirkaliki bahkan telah diperintahkan pemerintah pusat untuk dilakukan penataan. Sementara lainnya dikerjakan pihaknya dan telah selesai.

"Kita juga tidak hanya fokus kepada kolam retensi dan trotoar. Tapi juga melakukan penataan seke seperti di Gigendi, Babakan Tereup Nagrog, Buka Tamah dan Seke Dangder," ucapnya.

Ia menambahkan, di 2024 pun pihaknya akan kembali membuat kolam retensi di kawasan Gedebage, dan tempat-tempat lainnya apabila memang kondisinya memungkinkan. "Kolam retensi yang sedang kita buat di 2024 ada di kawasan Lodaya, Tegalega, Cilaki, Terusan Jalan Jakarta," ujar dia. ● pra



IDN/ANTARA

PENJUALAN SEPEDA LISTRIK DI ACEH

Pedagang menata sepeda listrik di salah satu pusat penjualan di Meulaboh, Aceh, Rabu (24/1). Menurut pedagang, dalam sehari dapat menjual lima hingga 19 unit sepeda listrik dengan harga Rp3,5 - 7 juta per unit tergantung merek.

Ketua Dewan Tantang Kadis Budpar Kab. Cirebon Soal Raperda Riparkab

CIREBON (IM)-Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon, Mohamad Luthfi menantang Kepala Dinas (Kadis) Kebudayaan dan Pariwisata (Budpar), Abraham Mohamad soal Raperda Riparkab.

Luthfi meminta Abraham untuk membuka dokumen dan menunjukkan di mana saja lokasi kawasan strategis pariwisata yang ada di Kabupaten Cirebon. "Silakan tanya kepada Pak Abraham, Kadis Budpar, di mana itu kawasan strategis pariwisata. Coba, suruh dia buka dokumennya," ungkap Luthfi, Rabu (24/1).

Luthfi menyebutkan, kenapa dia mengungkapkan masalah tersebut. Hal itu karena sebelumnya dituding Abraham, telah menyandera draf Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).

Isinya tentang Rencana Induk Pariwisata Daerah (Riparda) atau Rencana Induk Pariwisata Kabupaten (Riparkab).

Dia mengakui, Raperda sebetulnya sudah selesai dibahas sejak tahun lalu. Pihaknya tinggal pengesahan saja. Namun kendalanya, masih menunggu selesainya pembahasan revisi Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Sedangkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Gebang, overlay dengan RTRW Provinsi. Sementara draf RTRW Kabupaten sendiri berbeda. Padahal, RDTR adalah turunan dari RTRW. "Untuk itu RDTR Kecamatan Gebang kita hold dulu. Kami menunggu kesepakatan pembahasan leading sektor, baru RDTR disesuaikan. Kalau Riparda kita sahkan, terus nanti ada

penyesuaian lagi kan harus kerja duakali," ungkap Luthfi.

Luthfi mengaku, ada kaitan antara RTRW dengan Riparkab. Karena kawasan strategis pariwisata ditetapkan dalam RTRW. Sementara dasar dari penetapan kawasan strategis pariwisata, untuk payung di bawahnya. Jadi, RTRW merupakan mimpi Cirebon di masa-masa yang akan datang. Untuk itulah, harus dituangkan ke dalam Riparkab.

"Artinya DPRD tidak menjegal karena yang dilakukan sesuai prosedur. Nanti setelah RTRW selesai, baru Riparkab kita sahkan. Terus masalahnya apa, karena Bapemperda kembali memprogramkan agar Riparkab tetap masuk ke dalam Propemperda tahun ini. Tinggal disahkan kok," ucapnya.

Sementara itu, Kadis Budpar Kabupaten Cirebon, Abraham Muhamad menilai, Riparkab menjadi bagian sangat penting bagi Disbudpar Kabupaten Cirebon. Ini karena sebagai landasan regulasi utama dalam pembangunan pariwisata daerah secara menyeluruh dan bukan hanya parsial tentang Kawasan Strategis Pariwisata Daerah.

Dia menjelaskan, pariwisata merupakan bagian makro dari pembangunan. Dia mencontohkan, pembangunan pasar oleh disdad, pembangunan taman dan alun-alun oleh DLH, pembangunan embung oleh DPUTR, Media center dan smart city oleh Diskominfo, dan masih banyak lagi. Artinya, semua pembangunan itu bisa dijadikan daya tarik wisata dan destinasi pariwisata di Kabupaten Cirebon. ● pra

8 | Nusantara



IDN/ANTARA

GUBERNUR JATIM JENJUK KORBAN KECELAKAAN BUS SMA 1 SIDOARJO

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menjenguk siswa korban kecelakaan bus yang menjalani perawatan di RSUD Sidoarjo, Jatim, Rabu (24/1). Kecelakaan bus rombongan studi kampus SMAN 1 Sidoarjo terguling di Tol Ngawi, KM 577 A Solo-Surabaya, Kamis (18/1) malam tersebut menyebabkan 3 penumpangnya meninggal dunia dan belasan siswa lainnya mengalami luka-luka.

Kab. Bogor Punya 9 Anggota DPR tapi Tidak Dimanfaatkan untuk Selesaikan Masalah

Bupati Bogor atau Penjabat Bupati Bogor punya kekuatan besar karena hanya Kabupaten Bogor satu-satunya kabupaten di Indonesia yang punya wakil rakyat di tingkat pusat hingga 9 Anggota DPR. Dengan kekuatan politik itu, para anggota legislatif ini bisa mempercepat solusi permasalahan jalan khusus tambang dan turunannya.

BOGOR (IM)- Kabupaten Bogor dengan luas wilayah dan jumlah penduduknya terbilang istimewa, dan merupakan daerah yang dekat dengan ibu kota negara, memiliki 9 Anggota DPR.

Namun, kata Adian Napitupulu, 9 Anggota DPR ini tidak pernah duduk bareng dengan Bupati Bogor, DPRD Kabupaten Bogor maupun DPRD Jawa Barat untuk menyelesaikan permasalahan besar di Bumi Tegar Beriman.

Padahal, menurut politisi PDIP tersebut, 9 Anggota DPR dengan DPRD Kabupaten Bogor dan

DPRD Jawa Barat adalah kekuatan besar, untuk mengatasi permasalahan besar atau rumit untuk diselesaikan.

"Bisa tidak 9 Anggota DPR dari Dapil Kabupaten Bogor duduk bareng dan rutin per tiga bulan bersama Bupati Bogor, DPRD Kabupaten Bogor maupun DPRD Jawa Barat lalu menyelesaikan berbagai masalah seperti jalan khusus tambang?" kata Adian Napitupulu dalam diskusi Jaringan Jurnalis Bogor (JJB) di Lobby Gedung DPRD Kabupaten Bogor, Rabu (24/1).

Adian Napitupulu menuturkan, dengan kekuatan politik para anggota legislatif ia yakin bisa mempercepat solusi permasalahan jalan khusus tambang dan turunannya.

"Kalau kumpul dan duduk bareng, kita tinggal panggil Menteri dan lainnya, lalu kita cari solusi dan percepat waktu penyelesaiannya dalam kurun waktu setahun. Namun sayangnya, beberapa kali saya minta hingga seperti mengemis kepada Bupati Bogor untuk kumpul bareng tetapi tidak juga terwujud hingga Kabupaten Bogor dipimpin Penjabat Bupati," tuturnya.

Ia pun menjelaskan bahwa Bupati Bogor atau Penjabat Bupati Bogor punya kekuatan besar karena hanya Kabupaten Bogor satu-satunya kabupaten di Indonesia yang punya wakil rakyat di tingkat pusat hingga 9 Anggota DPR.

"Bupati atau Penjabat Bupati Bogor harus memanfaatkan kekuatan besar ini dan mengumpulkan

kami dalam kurun waktu enam bulan sekali, mereka bisa mencontoh ke rekan-rekan JJB yang berinisiatif melaksanakan diskusi publik peran Anggota DPR Dapil Kabupaten Bogor dalam percepatan pembangunan," jelas Adian.

Sedangkan, Anggota Komisi V DPR, Fadli Zon berharap kedepan dengan peran rekan-rekan jurnalis, Anggota DPR dari Dapil Kabupaten Bogor bisa duduk bareng dengan Bupati Bogor, DPRD Kabupaten Bogor maupun DPRD Jawa Barat bisa berjuang bersama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat.

"Dulu pernah terjadi, walaupun belum lengkap namun k edepan kita harus berkumpul dan duduk bareng. Untuk solusi jalan khusus tambang, selain kita butuh percepatan pembangunan jalan khusus tambang, penegakan aturan batasan tonase truk tambang juga harus ditegakkan," harap Fadli Zon.

Anggota Komisi V dan

Badan Anggaran (Banggar) DPR, Mulyadi menjelaskan bahwa ia siap memfasilitasi pertemuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Perhubungan dengan Pemprov Jawa Barat dan Pemprov Banten.

"Semoga dengan pertemuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Perhubungan dengan Pemprov Jawa Barat dan Pemprov Banten, ada solusi konkret atas permasalahan di Kecamatan Parungpanjang dan sekitarnya baik itu jangka pendek, menengah maupun panjang," jelas Mulyadi.

Sementara itu, Ketua JJB, Effendi Tobing menyayangkan dari 9 Anggota DPR yang diundang dalam acara diskusi publik itu hanya 3 orang yang hadir. Ia pun mempertanyakan komitmen mereka yang tidak hadir termasuk Penjabat Bupati Bogor, Asmawa Tosep, terutama yang tidak memberikan konfirmasi. ● gio

Pengusaha Restoran dan Kafe di Bandung Diminta Kelola Sampah Mandiri

BANDUNG (IM)- Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung meminta pengusaha restoran dan kafe agar mengelola sampah secara mandiri dari sumbernya sebagai upaya untuk mengurangi timbulan sampah yang dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti, Kabupaten Bandung Barat.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandung, Dudy Prayudi mengatakan komposisi sampah di restoran dan kafe lebih didominasi oleh sampah organik dan sisanya masih memiliki nilai jual untuk diolah. "Komposisi sampah di restoran dan kafe sekitar 60 persen organik dan 40 persen memiliki nilai jual, seperti botol minuman," kata Dudy di Bandung, Rabu (24/1).

Menurut dia, untuk sampah residu yang dihasilkan

oleh tempat kuliner itu sangat minim. Perkiraannya hanya sekitar 10 persen. Oleh karena itu, ia mengajak kepada para pengusaha agar mengolah sampah mulai dari sumbernya.

"Kalau lihat di lapangan atau di tempat pembuangan sampah, sampahnya masih campur. Oleh karena itu, kami imbau para pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Kafe dan Restoran (Akar) Kota Bandung secara bersama menyelesaikan sampah di sumbernya," kata dia.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLH Kota Bandung, Salman Faruq mengungkapkan kesadaran warga Kota Bandung mengelola sampah mulai meningkat.

Dia menyebutkan saat ini terjadi penurunan produksi sampah baik dari permukiman maupun

non-permukiman. Awalnya 0,63 kilogram per orang per hari, sekarang hanya 0,54 kilogram.

"Ini mengindikasikan bahwa tumbuh kesadaran setiap orang untuk bijak dalam mengelola sampah," katanya.

Kendati demikian, lanjut dia, sosialisasi dan gerak nyata secara masif masih diperlukan untuk edukasi masyarakat dalam mengelola sampah. Pasalnya, saat ini masih terjadi pembatasan untuk mengirimkan sampah ke TPA Sarimukti.

"Di Kota Bandung saat ini produksi sampah sekitar 1.300 ton per hari, 60 persennya sampah rumah tangga dan 40 persen non-rumah tangga. Pada bulan Januari 2024, ada pembatasan ke TPA Sarimukti yaitu 50 persen pengiriman sampah atau 628 ton per hari hanya boleh sampah residu," kata dia. ● pra



IDN/ANTARA

PERCEPATAN PEREKAMAN KTP BAGI PEMILIH PEMULA

Siswa antre untuk perekaman KTP elektronik di SMA Kartika XIX-1 Bandung, Jabar, Rabu (24/1). Pemkot Bandung tengah mempercepat perekaman KTP elektronik bagi pemilih pemula dengan melakukan perekaman jemput bola setiap hari ke berbagai SMA dan SMK di Kota Bandung guna mengejar jumlah daftar pemilih tetap pemula pada Pemilu 2024.

KAI Luncurkan Tiga KA Baru Tingkatkan Aksesibilitas di Jalur Selatan Jawa Barat

BANDUNG (IM)- PT Kereta Api Indonesia (Perero) meluncurkan tiga KA baru pada Rabu, yaitu KA Papandayan Ekspres (Garut-Gambir), KA Pangandaran (Banjar-Gambir), dan KA Malabar keberangkatan pagi hari (Bandung-Malang), demi meningkatkan aksesibilitas di jalur selatan Jawa Barat," ucap Didiek.

Tarif KA Papandayan, dibanderol dengan harga Rp252.000 untuk kelas eksekutif, dan Rp156.000 untuk kelas ekonomi. Adapun tarif KA Pangandaran di benderol dengan harga Rp296.000 untuk kelas eksekutif, dan Rp180.000 untuk kelas ekonomi.

Sementara untuk tarif KA Malabar keberangkatan pagi dengan harga Rp420.000 untuk kelas eksekutif, dan Rp240.000 untuk kelas ekonomi. "Tarif tersebut merupakan tarif promo 20 persen yang berlaku hingga 31 Januari 2024," ucapnya.

Peresmian peluncuran tiga KA ini dilaksanakan pada Rabu di Stasiun Garut pada pukul 12.30 WIB. Adapun jadwal keberangkatan tiga KA baru tersebut:

1. KA Papandayan:
- Berangkat dari Stasiun Garut jam 12.30 WIB, tiba di Stasiun Gambir jam 17.45 WIB (berangkat dari Stasiun Bandung jam 15.00 WIB)
- Berangkat dari Stasiun Gambir jam 06.30 WIB, tiba di Stasiun Garut jam 11.20 WIB (tiba di Stasiun Bandung jam 09.15 WIB)

2. KA Pangandaran:
- Berangkat dari Stasiun Banjar jam 16.55 WIB, tiba di Stasiun Gambir jam 00.49 WIB (berangkat dari Stasiun Bandung jam 22.00 WIB)
- Berangkat dari Stasiun Gambir jam 09.30 WIB, tiba di Stasiun Banjar jam 16.25 WIB (tiba di Stasiun Bandung jam 12.15 WIB)

3. KA Malabar keberangkatan pagi:
- Berangkat dari Stasiun Malang jam 05.40 WIB, tiba di Stasiun Bandung jam 17.58 WIB
- Berangkat dari Stasiun Bandung jam 09.50 WIB, tiba di Stasiun Malang jam 22.55 WIB. ● pra